

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang Masalah**

Pemerintah membutuhkan sarana dan prasarana yang memadai dalam menyelenggarakan pemerintahan yang efektif dan efisien. Sarana dan prasarana tersebut mempunyai peranan penting pada aktivitas pemerintahan sehingga sejalan dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Sarana dan prasarana tersebut merupakan bagian dari Barang Milik Negara (BMN). Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara menjelaskan bahwa Barang Milik Negara merupakan semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBN atau berasal dari perolehan lainnya yang sah. Oleh karena itu, pertanggungjawaban atas pengelolaan BMN harus dilakukan secara baik dan akuntabel sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara. Disamping itu, pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah sebagai standar pertanggungjawaban atas pengelolaan keuangan negara.

Menteri Keuangan selaku *Chief Financial Officer* (CFO) Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 181/PMK.06/2016 tentang Penatausahaan Barang Milik Negara. Pasal 3 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 181/PMK.06/2016 menjelaskan bahwa ruang lingkup penatausahaan BMN meliputi: Pembukuan, Inventarisasi dan Pelaporan. Peraturan tersebut dimaksudkan sebagai pedoman dan tertib administrasi dalam pengelolaan BMN. Selain itu, peraturan tersebut juga dimaksudkan dalam rangka menyikapi perkembangan pengelolaan BMN, baik di tingkat pusat maupun daerah. Penatausahaan BMN termasuk lingkup keuangan negara yang menuntut adanya pertanggungjawaban, akuntabilitas serta transparansi (Saragih, 2017).

Pada era digitalisasi saat ini, kemajuan teknologi informasi berkembang sangat cepat. Dalam rangka menciptakan pengendalian dan pengawasan

pengelolaan BMN yang optimal, efisien dan efektif, Menteri Keuangan melalui Surat Nomor 220/MK.6/2015 tanggal 26 Juni 2015 menetapkan bahwa pengelolaan BMN saat ini menggunakan Aplikasi Sistem Manajemen Aset Negara (SIMAN). Melalui laman resmi Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN), DJKN telah mensosialisasikan penggunaan aplikasi SIMAN ke satuan kerja selaku pengguna barang sejak awal tahun 2016. Aplikasi ini dirancang oleh Kementerian Keuangan guna mendukung proses pengelolaan BMN di lingkungan pemerintahan. Pengelolaan BMN tersebut meliputi perencanaan, penggunaan, pemanfaatan, pemeliharaan, penatausahaan, penghapusan, dan pemindahtanganan aset negara. Aplikasi ini berbasis internet sehingga setiap saat dapat diakses oleh pengelola maupun pengguna barang. Pada kolom berita laman resmi DJKN tersebut juga dijelaskan bahwa SIMAN didesain dengan fitur dan atribut yang lebih lengkap, seperti: identitas aset, riwayat pengelolaan, riwayat pemeliharaan, riwayat penilaian, riwayat pemakai, riwayat mutasi, lokasi posisi GPS, foto dan dokumen digital.

Aplikasi SIMAN merupakan *upgrade* teknologi dari aplikasi Sistem Informasi Manajemen Akuntansi Keuangan-Barang Milik Negara (SIMAK-BMN). Pada prakteknya data aplikasi SIMAN tetap bersumber dari data aplikasi SIMAK-BMN. Aplikasi SIMAK-BMN adalah aplikasi pengelolaan BMN yang efektif digunakan pada kurun waktu sebelum adanya aplikasi SIMAN. Aplikasi SIMAK-BMN diselenggarakan dengan tujuan untuk menghasilkan informasi yang diperlukan sebagai alat pertanggungjawaban atas pelaksanaan APBN serta pengelolaan/pengendalian BMN yang dikuasai oleh suatu unit akuntansi barang (Rahardiyanti dan Abdurachman, 2012). Dalam penggunaan aplikasi SIMAK-BMN, pengguna masih menemui permasalahan terkait hasil rekonsiliasi data BMN yang disajikan. Oleh karena itu, Aplikasi SIMAN diharapkan dapat menjadi solusi atas permasalahan tersebut dan meningkatkan kualitas hasil rekonsiliasi data BMN sehingga laporan BMN dapat disajikan secara akurat, lengkap, dan tepat waktu.

Penelitian terkait efektivitas sistem aplikasi pengelolaan BMN telah dilakukan sebelumnya oleh Rahardiyanti dan Abdurachman (2012) dan Nasrudin (2015). Menurut Rahardiyanti dan Abdurachman (2012), faktor yang signifikan

berpengaruh terhadap efektivitas pengelolaan BMN berbasis sistem informasi tersebut adalah kemudahan (Stapples dan Seddon, 2004; Kassim *et al.*, 2012), kegunaan, dan kualitas sistem (Delone dan Mclean, 1992; 2003; 2016). Sedangkan, menurut Nasrudin (2015), informasi yang mampu disajikan oleh sistem informasi dan kualitas kemampuan pengguna (Veriana dan Budiarta, 2016; Kusumawati dan Ayu, 2019; Putri dan Srinandi, 2020) menentukan tingkat efektivitas penggunaan suatu sistem. Hasil penelitian Sabario dan Hendri (2017) menunjukkan bahwa keberadaan aplikasi SIMAK-BMN berpengaruh signifikan terhadap efektivitas pelaporan aset BMN. *Tools* tersebut dapat digunakan secara efektif apabila pegawai yang ditempatkan sebagai operator sistem memiliki bekal pengetahuan yang memadai dalam mengoperasikan aplikasi (Nasrudin, 2015).

Penelitian-penelitian serupa terkait efektivitas penggunaan suatu sistem juga telah banyak dilakukan. Efektivitas dari suatu sistem tersebut dapat diinterpretasikan melalui kepuasan pengguna sistem (Remenyi *et al.*, 2007:79). Penerapan pengukuran efektivitas suatu sistem secara umum mengadopsi model Delone dan Mclean (Livari, 2005; Wahyuni, 2011; Arifin 2012; Roky dan Meriouh, 2015; Mardiana *et al.*, 2015; Saputro *et al.*, 2015; Stefanovic *et al.*, 2016; Rosadi *et al.*, 2016; Rukmiyati, 2016; Antong dan Usman, 2017; Ikhyannuddin, 2017; Krisdiyantoro *et al.*, 2018). Model tersebut terbukti dapat diterapkan pada sektor swasta maupun sektor publik terutama pada lembaga non pemerintah seperti lembaga pendidikan dan kesehatan (Petter *et al.* dalam Ikhyannuddin, 2017). Model Delone dan Mclean sukses dikembangkan di sektor publik oleh Livari (2005).

Efektivitas penatausahaan BMN pada suatu entitas dapat ditinjau dari sisi pembukuan, inventarisasi, dan pelaporan yang dilaksanakan sesuai dengan standar prosedur yang ditetapkan (Saragih, 2017). Apabila tidak didukung oleh sumber daya manusia yang cukup dan kompeten maka penatausahaan BMN tidak akan berjalan secara efektif. Disamping itu, faktor perencanaan, penatausahaan, penggunaan, dan bimbingan teknis BMN juga berpengaruh terhadap pengelolaan aset BMN pada suatu entitas publik (Tulungen, 2014). Idealnya, peninjauan kembali melalui evaluasi dan bimbingan teknis (pendidikan) terhadap penggunaan suatu sistem perlu dilakukan sehingga informasi yang dihasilkan dapat digunakan

secara optimal bagi pihak yang berkepentingan (Arifin dan Suryo, 2012). Sumber daya yang tersedia seperti kualitas sistem dan kualitas layanan yang dibutuhkan dapat menentukan kesuksesan suatu informasi yang digunakan (Ikhyanuddin, 2017).

*Delone-Mclean Model for Information System Success* dinilai secara umum dapat digunakan untuk menilai keberhasilan suatu sistem dalam memenuhi kepuasan penggunaannya (Wahyuni, 2011; Rosadi *et al.*, 2016; Antong dan Halim, 2017; Ikhyanuddin, 2017). Model ini sederhana dan dianggap cukup valid walaupun juga cukup banyak kritikan terhadap model ini (Ikhyanuddin, 2017). Kemudian, DeLone dan Mclean menyempurnakan model kesuksesan sistem informasi tersebut dengan istilah yang dikenal sebagai *Updated D&M IS Success Model* (2003). Model *Update D&M IS Success* ini merupakan dampak dari kemajuan yang luar biasa akan pengaruh sistem informasi pada bisnis dan masyarakat serta penelitian terkait keberhasilan suatu sistem informasi. Saat ini, literatur mengenai metode pengukuran efektivitas sistem informasi sudah banyak dipublikasikan. Salah satunya berjudul “*The Effective Measurement and Management of ICT Costs & Benefits*” (Remenyi *et al.*, 2007). Menurut Remenyi *et al.* (2007: 198), suatu sistem informasi yang digunakan dapat dinilai tingkat manfaatnya menggunakan analisis faktor pada capaian dan kinerja data.

Penatausahaan BMN adalah hal yang wajib dilaksanakan oleh setiap pengguna barang. Hal tersebut sebagai bentuk dari pertanggungjawaban atas pengelolaan BMN. Pengguna barang juga perlu didukung dengan *tools* yang memadai sehingga pengawasan dan pengendalian BMN dapat dilakukan secara efektif dan efisien. Oleh karena itu, fokus penelitian ini adalah untuk membuktikan secara empiris pengaruh sistem manajemen aset negara-pengguna barang (SIMAN-PB) terhadap penatausahaan BMN yang diukur dari faktor kualitas sistem, kualitas informasi yang dihasilkan, kemudahan penggunaan, aksesibilitas pengguna, dan kompetensi pengguna.

## **1.2. Perumusan Masalah**

Dari uraian di atas dapat dirumuskan masalah melalui pertanyaan sebagai berikut:

1. Apakah kualitas sistem aplikasi SIMAN berpengaruh terhadap penatusahaan BMN?
2. Apakah kualitas informasi yang dihasilkan SIMAN berpengaruh terhadap penatusahaan BMN?
3. Apakah kemudahan penggunaan SIMAN berpengaruh terhadap penatusahaan BMN?
4. Apakah aksesibilitas pengguna SIMAN berpengaruh terhadap penatusahaan BMN?
5. Apakah kompetensi pengguna SIMAN berpengaruh terhadap penatusahaan BMN?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Penelitian ini bertujuan untuk membuktikan secara empiris atas:

Pengaruh SIMAN terhadap penatusahaan BMN yang diukur dari faktor kualitas sistem, kualitas informasi yang dihasilkan, kemudahan penggunaan, aksesibilitas pengguna, dan kompetensi pengguna terhadap penatusahaan BMN pada salah satu unit kerja di lingkungan Kementerian/Lembaga Pemerintahan, khususnya Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.

### **1.4 Manfaat Penelitian**

Manfaat yang diperoleh dari penelitian ini adalah:

1. Bagi institusi Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia (STEI)

Penelitian ini memberikan kontribusi berupa pemahaman bahwa saat ini pengelolaan BMN pada satuan kerja di lingkungan Kementerian/Lembaga Pemerintahan Republik Indonesia telah menggunakan aplikasi SIMAN.

2. Bagi pengelola BMN

Penelitian ini bermanfaat dalam memberikan gambaran terkait faktor-faktor yang mempengaruhi proses penatusahaan BMN melalui penggunaan aplikasi SIMAN sehingga dapat mewujudkan pengelolaan BMN yang optimal, efektif, dan efisien.

3. Bagi penelitian selanjutnya

Penelitian ini bermanfaat untuk menjadi referensi dalam mengembangkan indikator penelitian terkait faktor-faktor yang mempengaruhi proses penatusahaan BMN melalui penggunaan aplikasi SIMAN.